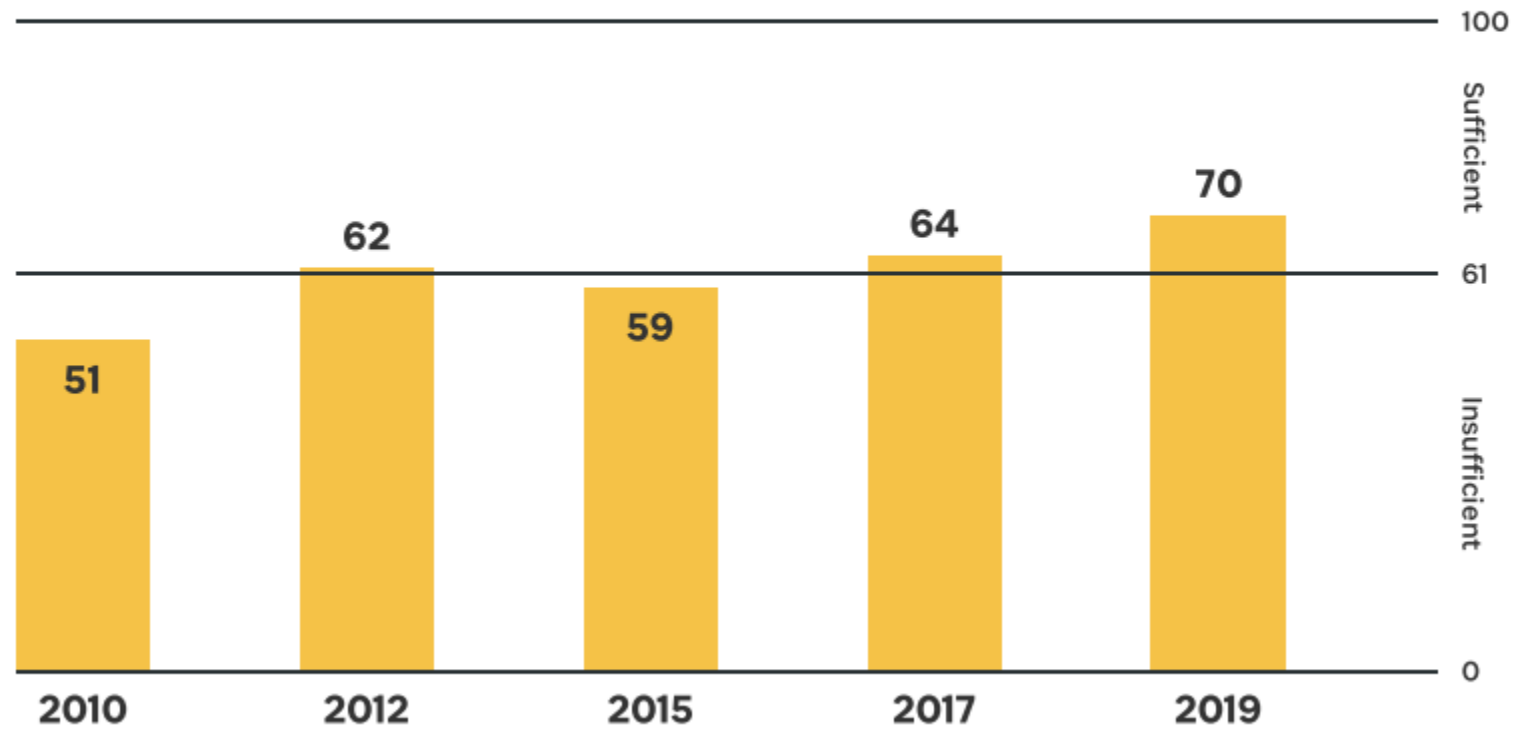




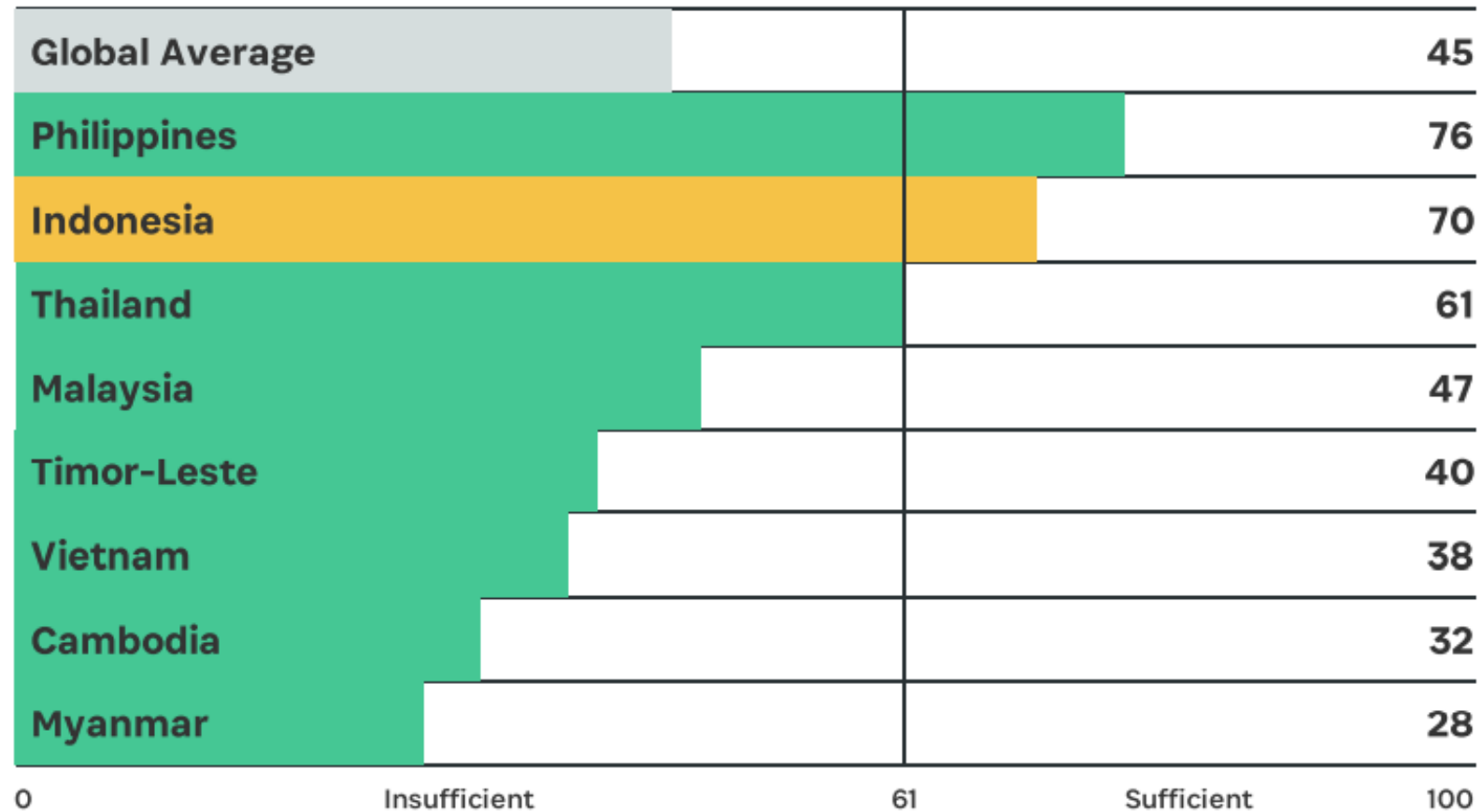
Pemetaan Informasi APBN yang Perlu Diupgrade Tahun Mendatang

Misbah Hasan
Sekjen FITRA

Perubahan Index Transparansi Indonesia



Transparansi di Indonesia Berbanding Negara Lain



Ketersediaan Dokumen Anggaran di Indonesia

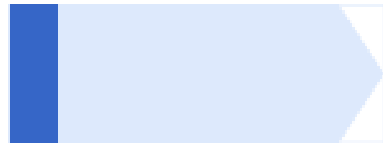
Document	2010	2012	2015	2017	2019
Pre-Budget Statement	●	●	●	●	●
Executive's Budget Proposal	●	●	●	●	●
Enacted Budget	●	●	●	●	●
Citizens Budget	⊘	●	●	●	●
In-Year Reports	●	●	●	●	●
Mid-Year Review	●	●	●	●	●
Year-End Report	●	●	●	●	●
Audit Report	●	●	●	●	●

Partisipasi Publik Indonesia Berbanding Negara Lain



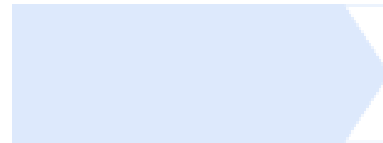
Partisipasi Publik di Indonesia dalam Tahapan Perencanaan dan Penganggaran

13 /100



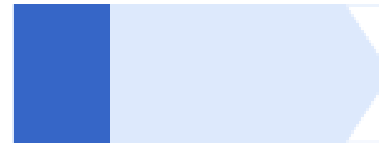
Formulation
(executive)

0 /100



Approval
(legislature)

25 /100



Implementation
(executive)

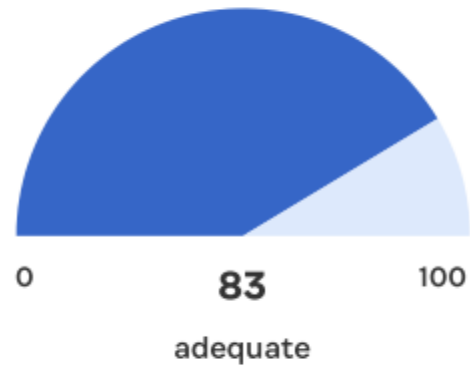
56 /100



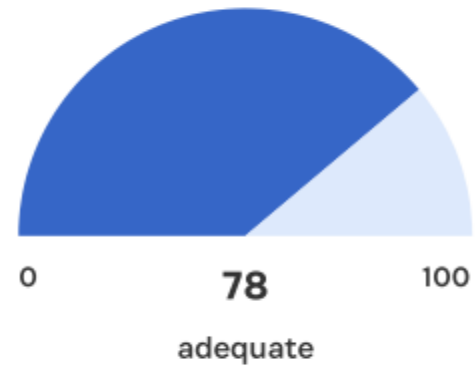
Audit
(supreme audit
institution)

few: 0 - 40; limited: 41 - 60; adequate: 61 - 100

Pengawasan oleh Legislatif



Pengawasan oleh Lembaga Audit (SAI)



weak: 0 - 40; limited: 41 - 60; adequate: 61 - 100

OBS COVID-19

Penelitian dilakukan 1 Maret sampai 30 September 2020

- OBS diselenggarakan di 120 negara
- Terdapat 26 indikator yang didasarkan norma-norma keijakan fiscal dari IMF, INTOSAI, GIFT, & OCP
- Indikator dibagi dalam 3 topik:
 - Transparansi Kebijakan
 - Partisipasi Publik
 - Pengawasan Kebijakan
- Ruang lingkup kebijakan yang diteliti adalah seluruh kebijakan fiskal seperti pendapatan, belanja, pembiayaan, serta manajemen anggaran.
- Setiap topik diberikan skor kinerja antara 0,00 hingga 1,00

Kategori Kinerja	Skor
<i>Substantive/Banyak</i>	0,81 to 1,00
<i>Adequate/Cukup</i>	0,61 to 0,80
<i>Some//Sedikit</i>	0,41 to 0,60
<i>Limited/Terbatas</i>	0,21 to 0,40
Minimal	0,00 to 0,20

Hasil Internasional

- Tidak ada pemerintah yang mendapatkan nilai SUBSTANTIVE
- Mayoritas pemerintah 'gagal' dalam meningkatkan akuntabilitas
- Peran legislatif dibatasi selama pandemi
- Pemerintah jarang mencari masukan dari publik, terutama dari masyarakat yang paling terdampak
- Momen pandemi adalah momen untuk berinovasi bagi pemerintah

KINERJA	JUMLAH NEGARA
<i>Substantive/Banyak</i>	0
<i>Adequate/Cukup</i>	4
Some/Sedikit	29
Limited/Terbatas	56
Minimal	31

Tingkat Akuntabilitas	Jumlah Negara (Dari 120)	Negara
<i>Substantive/Banyak</i>	0	
<i>Adequate/Cukup</i>	4	Australia, Norwegia, Peru, Filipina
<i>Some/Sedikit</i>	29	Bangladesh, Brazil, Bulgaria, Kanada, Chili, Kolombia, Costa Rica, Kroasia, Fiji, Perancis, Jerman, Indonesia , Italia, Jamaica, Jepang, Republic Kyrgyzstan, Mongolia, Selandia Baru, Nigeria, Paraguay, Polandia, Portugal, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Swedia, Inggris Raya, Amerika Serikat
<i>Limited/Terbatas</i>	55	Afghanistan, Angola, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Botswana, Kamerun, China, Pantai Gading, Republik Czech, Republik Dominican, Ecuador, El Salvador, Georgia, Ghana, Guatemala, Honduras, Yordania, Kazakhstan, Kenya, Lesotho, Liberia, Macedonia, Madagaskar, Malaysia, Mali, Meksiko, Moldova, Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Papua Nugini, Rumania, Rusia, Rwanda, Senegal, Serbia, Somalia, Korea Selatan, Spanyol, Sri Lanka, São Tomé e Príncipe, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad dan Tobago, Uganda, Ukraina, Vietnam, Zambia
<i>Minimal</i>	32	Albania, Algeria, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamboja, Chad, Comoros, Dem. Rep. of Congo, Mesir, Equatorial Guinea, Eswatini, Ethiopia, Hungaria, India, Irak, Libanon, Malawi, Maroko, Myanmar, Qatar, Arab Saudi, Sudan Selatan, Sudan, Tajikistan, Tanzania, Gambia, Tunisia, Turki, Venezuela, Yaman, Zimbabwe

HASIL PENILAIAN INDONESIA

TRANSPARANSI

- Informasi makro ekonomi dan makro APBN cukup banyak tetapi tidak mendetail.
- Program Covid-19 dan PEN yang dimumkan tidak detil, baik dari segi penerima manfaat maupun kinerjanya
- Tidak ada *impact assessment*, terutama kepada perempuan dan kelompok marjinal
- Laporan pengadaan tidak memiliki tag 'covid' sehingga menyulitkan pencarian informasi pengadaan
- Ex: <https://www.kemenkeu.go.id/covid19>
 - Memuat berbagai kebijakan dan anggaran penanganan Covid-19, termasuk contac center K/L terkait, namun kurang update.
 - Ex: Informasi Realisasi Anggaran Bansos yang disajikan masih Per 16 April 2020

SOME/SEDIKIT	
Pengumuman kebijakan	Sedikit
Informasi makro ekonomi dan anggaran secara umum	Banyak
Cakupan kebijakan	Cukup
Penerima manfaat dan kinerja	Terbatas
Sumber pembiayaan	Sedikit
Extra-budgetary Funds (Badan Layanan Umum)	Minimal
Implementasi kebijakan	Terbatas
Laporan realisasi dan penyerapan	Terbatas
Extra-budgetary Funds (Badan Layanan Umum)	Minimal
Pengadaan	Minimal

PENGAWASAN

- Tidak ada informasi mengenai bagaimana DPR mengawasi APBN ataupun PC-PEN
- Hasil audit BPK atas anggaran sosial selama pandemi belum dirilis

TERBATAS

Peran legislatif

Sedikit

Peran BPK

Minimal

Praktik Baik :

- Di Filipina, ketentuan khusus terkait Covid-19 dimasukkan dalam “[Bayanihan to Heal as One Act](#)” – Regulasi yang merinci langkah-langkah penanganan Covid-19 dan memastikan laporan mingguan penanganan Covid-19 diterima oleh Kongres;
- Di Inggris Raya, Komite Akuntan Publik Parlemen (Banggar) menyusun program kerja untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan Pajak selama pandemi dan penyelidikan terhadap Belanja Pemerintah.
- Di Nepal, Banggar setempat melakukan investigasi potensi penyimpangan Belanja Kesehatan.

PARTISIPASI PUBLIK

- Tidak ada konsultasi publik yang dilakukan dalam merencanakan dan mengevaluasi program penanganan Covid-19 dan PEN;
- Lembaga-Lembaga pemerintah, DPR dan BPK sudah memiliki saluran pengaduan, tapi belum optimal

TERBATAS	
Partisipasi Publik	Terbatas

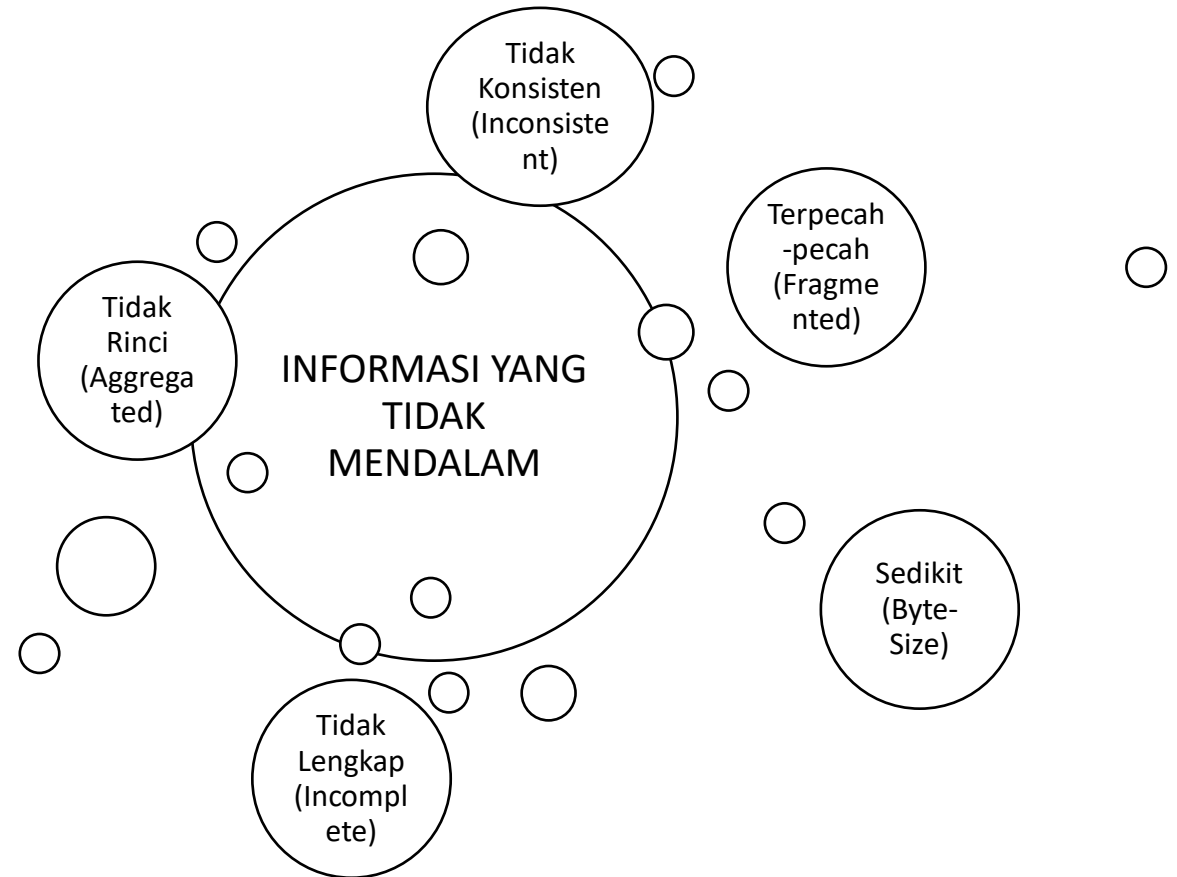
Praktik Baik :

- Norway adalah satu-satunya negara di mana eksekutif dan legislatif melakukan konsultasi publik yang memadai dengan pemangku kepentingan utama—termasuk berbagai kelompok yang kurang beruntung—baik perumusan maupun pelaksanaan kebijakan tanggap darurat Covid-19;
- Di El Salvador – Legislatif membentuk Komite Ad Hoc yang melibatkan LSM dan Akademisi setempat memantau dan mengawasi anggaran Covid-19;
- Di Chili dibentuk the [*Comisión del Gasto Público*](#), Badan Konsultasi Publik yang melibatkan LSM setempat untuk membantu peningkatan transparansi, serta kualitas dan efektivitas Belanja Publik.

Temuan Umum :

Informasi tersedia tapi tidak mendalam

- Pemerintah secara rutin menginformasikan kebijakan penanganan pandemi ke publik dengan tampil di media dan acara-acara publik.
- Informasi tidak terperinci (aggregated), terpecah-pecah (fragmented), dan dirilis sedikit demi sedikit (byte-size).
- Dokumen resmi susah didapatkan dan walaupun didapat tidak memiliki informasi lengkap.
- Informasi publik yang ada tidak konsisten dan tidak mutakhir.



KESIMPULAN

- Secara umum, tingkat Transparansi Indonesia cukup bagus, namun tidak berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat.
- Pengelolaan anggaran PC-PEN berada pada tingkat 'Some' atau 'Sedikit' yang menunjukkan adanya cukup banyak informasi terkait kebijakan fiskal seperti revisi APBN dan program PEN, tetapi tidak banyak menunjukkan informasi dan penjelasan terkait kinerja anggaran, hasil pengawasan BPK dan DPR, serta partisipasi publik dalam menentukan penganggaran.
- Kemenkeu dan elemen pemerintah lain menunjukkan praktik baik dalam berusaha untuk menginformasikan kebijakan fiskal sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Akan tetapi, masih ada kesenjangan antara informasi yang diberikan dengan kedalaman informasi yang dibutuhkan masyarakat. Salah satu informasi yang tidak tersedia, adalah informasi terkait isu gender.
- Pengadaan barang dalam masa darurat pandemi Covid-19 tidak bisa dengan mudah dilihat dalam situs-situs pengadaan barang dan jasa.
- Walaupun sudah diumumkan rencana BPK untuk melakukan audit atas penganggaran Covid-10, hasilnya belum diumumkan hingga kini.
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam penganggaran Covid-19 cukup rendah. Tidak diketahui bagaimana masukan masyarakat diakomodasi dalam penentuan program PEN.

REKOMENDASI

- Kementerian keuangan perlu menyajikan informasi anggaran hingga ke level rincian output dan komponen;
- Kementerian keuangan perlu terus mengembangkan mekanisme budget tagging sebagaimana di isu lingkungan hidup.
- Pemerintah perlu memutakhirkan portal informasi terkait Covid-19 secara rutin, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat akan informasi yang lebih detail.
- Diperlukan adanya informasi kebijakan fiskal yang terkonsolidasi dan rinci yang menggambarkan kebutuhan penganggaran, tingkat yang bisa dijalankan dalam APBN, serta kinerja penganggaran, terutama yang berkaitan dengan perempuan dan masyarakat yang terpinggirkan.
- Situs informasi pengadaan barang dan jasa perlu dimutakhirkan agar masyarakat bisa dengan mudah pengadaan selama masa pandemi.
- BPK dan DPR perlu dengan segera menginformasikan hasil pengawasannya terkait kebijakan-kebijakan penanganan pandemi, termasuk program PEN.
- Pemerintah, termasuk BPK dan DPR, perlu melibatkan publik lebih banyak dalam penentuan serta pelaporan kinerja penganggaran selama masa pandemic Covid-19.

TERIMA KASIH



[FITRA TV](#)



[@seknasfitra](#)



[Seknas FITRA](#)



[@seknasfitra](#)



www.seknasfitra.org